

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Implementasi jaminan hak kesehatan terhadap Suku Anak Dalam di Kabupaten Dharmasraya belum diterapkan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari segi kepemilikan kartu BPJS Kesehatan bagi Suku Anak Dalam yang belum memperoleh kartu BPJS Kesehatan, dari aspek pelayanan kesehatan terhadap suku anak dalam tetap diberikan oleh Puskesmas meskipun dengan fasilitas kesehatan. Kemudian Aspek pembiayaan dari Pemerintah untuk membayar iuran Peserta BPJS Kesehatan bagi Suku Anak Dalam juga belum dianggarkan. Dengan demikian jaminan kesehatan terhadap suku anak dalam belum bisa diterapkan oleh Negara sebagai pihak yang bertanggung jawab.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi hak jaminan kesehatan bagi sekelompok masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) tidak adanya

identitas kependudukan seperti Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan hidup mereka yang sering berpindah-pindah tempat (*nomaden*) dan tidak adanya pendidikan, anggaran Pemerintah Daerah yang terbatas, maka implementasi hak jaminan kesehatan tersebut sulit diwujudkan.

3. Kebijakan pemerintah daerah kabupaten dharmasraya dalam memfasilitasi hak jaminan kesehatan bagi Suku Anak Dalam belum bisa terealisasi dengan baik atau pemerintah daerah belum bisa berbuat banyak dalam memfasilitasi hak jaminan kesehatan bagi Suku Anak Dalam, karena kurangnya anggaran yang menjadi penyebab utama untuk memfasilitasi hak jaminan kesehatan bagi Suku Anak Dalam, karena 82% anggaran kesehatan untuk memfasilitasi hak jaminan kesehatan bagi Suku Anak Dalam butun anggaran, sedangkan anggaran untuk rakyat biasa saja belum memadai, rakyat biasa masih banyak permasalahannya dan masih banyak rakyat biasa yang ekonominya belum stabil (miskin) dan belum punya jaminan kesehatan, akan tetapi untuk langkah kedepan, apabila anggaran daerah sudah mencukupi atau bahkan berlebih, baru akan diarahkan pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan Suku Anak Dalam.

B. SARAN

1. Jaminan hak kesehatan bagi Suku Anak Dalam bisa diterapkan dengan cara melakukan pendataan dari Pihak Dinas Sosial Kabupaten Dharmasraya siapa saja Suku Anak Dalam yang berdomisili di Dharmasraya. Kemudian data tersebut di rekomendasikan kepada Dinas Catatan Sipil untuk segera diterbitkan Kartu Keluarga serta Kartu Tanda Penduduk. Dinas PUPR juga membuatkan hunian tetap bagi Suku Anak Dalam untuk merubah pola hidup

yang bersifat Nomaden. Yang terakhir adalah Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten harus bersinergi dalam menyediakan anggaran untuk membiayai Iuran bagi Suku Anak Dalam yang menjadi peserta BPJS. Jika ini dilakukan oleh Pemerintah maka jaminan kesehatan terhadap Suku Anak Dalam bisa di Implementasikan.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Dharmasraya mengeluarkan kebijakan khusus untuk memberikan jaminan kesehatan kepada kelompok masyarakat Suku Anak Dalam (SAD) dan membuat program anggaran untuk memberikan jaminan kesehatan kepada Suku Anak Dalam tanpa mendaftarkan sebagai peserta BPJS, dan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, memberikan sosialisasi kepada Suku Anak Dalam (SAD) dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera tanpa adanya diskriminasi.
3. Dengan terbatasnya anggaran daerah untuk program suku anak dalam, diharapkan adanya anggaran dari APBN supaya tidak menghambat perhatian dan harapan Suku Anak Dalam kedepan. Disamping memenuhi hak dasar suku anak dalam seperti identitas kependudukan perlu ditindaklanjuti dengan segera mendaftarkan mereka sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional dengan iuran yang dibayarkan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.